

<b>Kementerian Kelautan dan Perikanan Inspektorat Jenderal</b>		Disusun oleh/Tanggal	Agung / 15 Juli 2025	
		Direviu oleh/Tanggal	Agung / 15 Juli 2025	
		Disetujui oleh/Tanggal	Sidik / 15 Juli 2025	
<b>UAPA</b>	<input type="checkbox"/>	Kementerian Kelautan dan Perikanan		
<b>UAPPA-E1</b>	<input type="checkbox"/>	BPPSDMKP		
<b>UAPPA-W</b>	<input type="checkbox"/>	Prov. Maluku		
<b>UAKPA</b>	<input type="checkbox"/>	427618 SUPM Waeheru		
<b>Uraian Catatan Hasil Reviu</b>				<b>Indeks KKR</b>
<b>Penyelenggaraan Akuntansi :</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Hasil Rekonsiliasi belum dapat didownload, namun pengakuan Satker telah tutup permanen modul GLP tanggal 13 Juli 2025;</li> <li>Berita Acara Rekon Internal telah disusun.</li> <li>Terdapat Piutang bukan pajak senilai Rp40.126.308,00 pada neraca berasal dari transaksi tahun lalu berupa pengembalian kelebihan pengembalian tukin guru bulan Mei s.d. Des 2024, setorannya dilakukan di Bulan Mei 2025, namun belum dilakukan jurnal balik oleh Satker.</li> <li>Penjelasan Piutang Bukan Pajak di CaLK belum tepat, seharusnya Mei s.d. Des 2024, namun tertulis Mei s.d. Des 2025.</li> <li>BAHIP telah ditandatangani, namun masih terdapat selisih Rp11.000,00 di Persediaan antara BAHIP dengan Neraca, namun Satker telah mengidentifikasi terdapat kurang catatan 1 buah Spidol seharga Rp11.000. Satker belum memperbaiki pada BAHIP.</li> <li>Utang kepada Pihak ketiga lainnya senilai Rp560.000,00 berupa LS Bendahara atas Pembayaran Honor Guru Tetap (GTT) Bulan Mei 2025, seharusnya sudah nol karena sudah diserahkan oleh bendahara kepada pegawai ybs, namun bendahara belum melakukan transaksi keluar pada SAKTI.</li> <li>Salah pembebanan akun Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan senilai Rp120.000,00 belum keluar persetujuan dari KPPN terkait permohonan ralat akun pendapatan, seharusnya ke 425151 (pendapatan penggunaan sarpras sesuai dengan tusi) berupa transaksi praktek kapal latih oleh instansi luar.</li> <li>BMN: Sertifikasi tanah oleh Pemprov Maluku belum dilakukan, karena masih menunggu antrian sertifikasi tanah lainnya, Pemprov Maluku sejatinya akan menyerahkan kepada SUPM Waeheru. Dokumen yang telah disimpan oleh Satker berupa Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah seluas 2,1 Ha.</li> </ol>				
<b>Penyajian LK :</b>				
<b>A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :</b>				
Realisasi Pendapatan senilai Rp254.627.751,00 dari Target senilai Rp475.000.000,00 Pagu anggaran Belanja Semester I 2025 senilai Rp16.337.505.000,00 dan realisasi senilai Rp5.826.136.496,00 telah sesuai dengan omspan.				
<b>B. Laporan Operasional :</b>				
Tidak ada koreksi				
<b>C. Laporan Perubahan Ekuitas :</b>				
Tidak ada koreksi.				
<b>D. Neraca :</b>				
Piutang bukan pajak seharusnya dikoreksi, menjadi nol, karena Satker belum melakukan jurnal balik. Utang kepada Pihak Ketiga, seharusnya dikoreksi, karena Bendahara telah menyetorkan Honor kepada Pegawai ybs senilai Rp560.000,00.				
<b>E. Catatan atas Keuangan (CaLK) dan CLBMN</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>CaLK/Pernyataan Tanggung Jawab telah ditandatangani oleh Kepala Satker, namun terdapat koreksi, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan pengungkapan pada beberapa akun yaitu Piutang Bukan pajak, Utang kepada Pihak Ketiga, .</li> <li>CaL BMN telah disusun, telah ditandatangani oleh Kepala Satker .</li> </ol>				

**Usulan Koreksi**

1. Agar berkoordinasi dengan KPPN untuk membuka modul GLP, supaya dapat memperbaiki neraca,
2. Melakukan input transaksi keluar atas honor yang telah dibayarkan senilai Rp560.000,00,
3. Melakukan jurnal balik atas piutang bukan pajak senilai Rp40.126.308,00.
4. Memperbaiki BAHIP untuk disesuaikan dengan kondisi riil di Gudang.
5. Berkoordinasi dengan Pemprov Maluku, untuk lanjutan proses sertifikasi tanah seluas 2,1 Ha.
6. Memperbaiki CaLK.

**Tindak Lanjut**

--	--	--

Jakarta, 15 Juli 2025

<b>Tim Reviu,</b>  <b>Octa Agung Nugroho</b>	<b>Operator SAKTI GLP,</b>  <b>Syamsiriga</b> <b>No. Hp: 081247372219</b>	<b>Operator SAKTI BMN,</b>  <b>Jefry Titiwar</b>
---	---	---